

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Guna merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik secara pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Setiap SKPD di Kabupaten Bangka Selatan dalam menyusun Rencana Strategis harus ada benang merah dengan visi, misi kota, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, karena di era pemilihan kepala daerah secara langsung, janji-janji politik di masa kampanye harus dipertanggungjawabkan.

Mengingat struktur organisasi dan tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi, perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan, maka semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat

dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa kepatutan.

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemda juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut. Oleh karena itulah sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap pemda.

Di era reformasi ini pemerintahan yang ada di setiap negara baik itu negara berkembang ataupun negara maju pastilah akan dituntut untuk bisa menunjukkan kualitas pemerintahan yang semakin membaik tiap tahunnya. hal ini dikarenakan bahwa setiap negara itu membutuhkan pemerintahan yang baik dan mampu menjalankan tugas sesuai wewenang setiap tugas negara agar terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good government governance*). Menurut Halim (2013:43) akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh

pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan. Laporan keuangan merupakan sebuah bentuk konkrit pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sebagai media bagi sebuah entitas untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya.

Laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai kebutuhan para pemakai. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Informasi yang terdapat di dalam LKPD harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Adapun karakteristik laporan keuangan meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pemerintah daerah sudah harus membuat laporan keuangan dalam bentuk neraca, laporan realisasi anggaran dan arus kas maka akuntansi keuangan daerah sudah harus menggunakan sistem pencatatan *double entry* atau berpasangan, artinya bahwa setiap kegiatan transaksi ekonomi dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan menjurnal didalam pencatatan tersebut ada sisi debet dan kredit. Sisi debet terletak disebelah kiri dan sisi kredit terletak disebelah kanan. Setiap pencatatan transaksi harus menjaga keseimbangan antara debet dan kredit atau *balance*.

Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintah daerah terdapat 2 subsistem akuntansi, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun laporan keuangan dengan sebaik mungkin.

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan T.A 2011 BPK RI Perwakilan Provinsi Bangka Belitung memberikan pendapat wajar dengan pengecualian. Harapan Kepala Perwakilan agar LHP tersebut dapat bermanfaat sebagai pendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan nrgara, sehingga cita-cita dapat tercapainya pemerintah yang bersih dan transparansi demi kesejahteraan rakyat. (www.bpk.go.id)

Kualitas laporan keuangan dapat diperkuat juga dari opini BPK. Kualitas terbaik dari laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di dalam mencapai opini WTP, peran dari sumber daya manusia yang kompeten sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Selain itu, proses penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu, cepat, dan tentunya data yang dihasilkan harus akurat, maka di dalam hal ini diperlukan adanya dukungan sistem akuntansi dan teknologi.

Kerja keras Bupati Bangka Selatan Justiar Noer dalam mengejar ketertinggalan dengan kabupaten lain akhirnya terbukti. Empat bulan menjabat Bupati di Negeri Junjung Besaoh, Justiar akhirnya mampu mengembalikan status Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI yang sebelumnya mendapat opini terburuk Disclaimer kini sejajar dengan kabupaten lainnya yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Jumat (15/7/2016) Bupati Basel secara resmi menerima LHP BPK dengan opini WDP.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal.

Saat ini sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia rata-rata masih lemah sehingga menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan relevan untuk pembuatan keputusan entitas. Dalam hal ini kemampuan pemerintah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten. Kompetensi SDM di bidang akuntansi sangat diperlukan untuk dapat memahami sistem akuntansi pemerintah daerah. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik dan didukung juga dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten dibidang akuntansi maka dapat meningkatkan proses pelaporan keuangan yang dihasilkan, sehingga bermanfaat bagi pemakai dan entitas dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada pemerintahan daerah, khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Selatan dengan judul **“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi SDM Terhadap Proses Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Selatan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah apakah sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif secara parsial dan simultan terhadap proses pelaporan

keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Selatan.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini masalah yang akan dirumuskan dan diuji adalah variabel sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan proses pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Selatan.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap proses pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Selatan.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap proses pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Selatan.
3. Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap proses pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan proses pelaporan keuangan pemerintah daerah. mengimplementasikan ilmu yang didapat dari perkuliahan maupun teori dalam penerapannya dengan masalah yang diteliti.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah bagi instansi, terkait seperti Pemerintah di Kabupaten Bangka Selatan dalam mengatasi proses pelaporan keuangan yang belum baik. Masalah pada proses pelaporan keuangan dapat diperbaiki dengan meningkatkan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia sehingga akan menjadi lebih baik dan sesuai yang diharapkan.

3. Secara Kebijakan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian-uraian teori laporan keuangan, proses pelaporan keuangan pemerintah daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia dan pendapat para pakar maupun hasil penelitian sebelumnya, model penelitian, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian yang digunakan, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik analisis data, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, tingkat pengembalian kuesioner yang telah terkumpul, deskripsi responden, hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis, dan setelah itu pembahasan dari analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian dan menjelaskan keterbatasan pada penelitian yang dilakukan penulis serta memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.